



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)  
**UNIT KERJA** : KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANDUNG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **HERI SUSILOWATI**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR**
3. NHK : **518830**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.310.000.000**

1. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 860.000.000
4. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
5. Tanah Seluas 80 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 249.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS/INOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 37.200.000****D. SURAT BERTHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 795.393.297**



## F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.391.593.297

## III. HUTANG

Rp. ----

## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.391.593.297

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.